

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Abidin, Zainal, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Aksin, Moh, 2015, *Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin, 2014, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Bakhri, Syaiful, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami, 2002 *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko, Prakoso, 1985, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gusmawati, Ila, 2021 *Bandung*, Padang: Universitas Ekasakti.
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Jaya, Ida Bagus Surya Dharma, 2016, *Klinik Hukum Pidana: Komponen Persiapan dan Praktek*, Denpasar: Udayana University Press.
- Kristiana, Yudi, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perspektif Hukum Progresif)* Yogyakarta: Thafa Media.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Machfud, Agus, 2018, *Pemberantasan Korupsi*, Surabaya: UNESA University Press.
- Mahkamah Agung RI, 1994, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Makarao, M. Taufik dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Margono, 2012, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum* dalam Putusan Hakim, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 2*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muchsin, H., 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Bandung: Mandar Maju.

_____, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

_____, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

_____, 2020, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Pamungkas, Gilang, 2020, *Kumulasi Dalam Pemidanaan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Proyatno, Admaja, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, Bandung: Cv Utomo.

Sabuan, Ansori, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.

Saleh, Roeslan, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indoensia.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1999, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soesilo, R, 1985, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea.

Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.

Sudirman, Antonius, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya : Suatu Pendekatan dari Prespektif Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Utrecht E, 1980, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.

Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tembilahan: PT. Nusantara Persada Utama.

Wantu, Frence M, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Reviva Cendekia.

Wibowo, Antonius Ps, 2016, *Suap Di Dunia Pendidikan Sebagai Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan*.

Jurnal :

Hendriawan, Benaya, 2017, *Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Acara Vol. 5 No. 1.

Holomoan, Putra, 2015, *Tinjauan Yuridis tentang Upaya-Upaya Hukum*, Jurnal Yurisprudencia Vol.1 No.1.

Ifrani, 2017, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*. Al' Adl Vol. IX No. 3.

Mumbunan, Rendi Renaldi, 2018, *Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*. Jurnal Lex Crimen, Vol. 7 No. 10.

Sulardi, 2015, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana*. Jurnal Yudisial Vol. 8. No. 3.

Supit, Allan Rouwman, 2016, *Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut KUHAP*, Jurnal Lex Privatum, Vol. IV. No. 7.

Supriyanta, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Jurnal Wacana Hukum, Vol. VIII, No.1.

Suryanto, Ahmad Fahd Budi, 2021, *Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia*, Jurnal Dharmasiswa, Vol. 1, No. 4.

Syukur, Kukun Abdul Syukur, *Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 3, No 2.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman